



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kebijakan Zonasi dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas di Kota Bekasi

Aliya Izet Begovic Yahya^{1*}, Usep Kasman², Endang Retnaningsih³, Supardi Uki Sajiman⁴, Hasbullah⁵

¹Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta Selatan, Indonesia, begovicnskw@gmail.com

²Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta Selatan, Indonesia, usepkasman@gmail.com

³Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta Selatan, Indonesia, ratnaningsih1972@gmail.com

⁴Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta Selatan, Indonesia, supardius77@gmail.com

⁵Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta Selatan, Indonesia, bhasbullah81@gmail.com

*Corresponding Author: begovicnskw@gmail.com

Abstract: *The education zoning policy implemented in Indonesia aims to equalize access and quality of education. This study specifically aims to analyze the impact of the zoning policy on the quality of education at SMA Negeri in Bekasi, by examining the implications of the policy and the factors influencing it. This research uses a qualitative approach, involving interviews, observations, and document analysis as well as previous literature reviews to gather data from students, teachers, and parents. The research results show that the zoning policy has successfully improved access to educational resources at the school. However, challenges such as infrastructure readiness and teaching quality still need to be addressed. In addition, this policy also affects the composition of students, making it more heterogeneous. Overall, students' academic performance has improved, but further efforts are needed to ensure that all students can reach their maximum potential. This research suggests the need for collaboration between schools, the government, and the community to support the success of the zoning policy and to sustainably improve the quality of education.*

Keywords: *Zoning Policy, Education Quality*

Abstrak: Kebijakan zonasi Pendidikan yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk meratakan akses dan kualitas pendidikan. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan zonasi terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri di Kota Bekasi., dengan melihat implikasi dari kebijakan dan factor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen serta kajian pustaka sebelumnya untuk menggali data dari siswa, guru, dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi telah berhasil meningkatkan akses terhadap sumber daya pendidikan di sekolah tersebut. Namun, tantangan seperti kesiapan infrastruktur dan kualitas pengajaran masih perlu diatasi. Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada komposisi siswa yang menjadi lebih heterogen. Prestasi akademik siswa secara keseluruhan mengalami peningkatan, namun diperlukan upaya lebih

lanjut untuk memastikan semua siswa dapat mencapai potensi maksimalnya. Penelitian ini menyarankan perlunya kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk mendukung keberhasilan kebijakan zonasi dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Zonasi, Kualitas Pendidikan

PENDAHULUAN

Kebijakan zonasi dalam dunia pendidikan adalah langkah pemerintah untuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik di Indonesia, tanpa memandang status ekonomi atau prestasi akademik. Di salah satu SMA Negeri di Kota Bekasi, yakni SMAN X, kebijakan ini diterapkan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi, di mana prioritas pendaftaran diberikan kepada siswa yang tinggal lebih dekat dengan sekolah.

Namun, penerapan kebijakan ini dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satunya adalah perubahan dalam keragaman latar belakang akademik siswa. Sebelum kebijakan ini diberlakukan, mayoritas siswa di SMA Negeri X Bekasi memiliki prestasi akademik yang tinggi. Setelah kebijakan diterapkan, beragam kemampuan akademik siswa diterima, yang menuntut sekolah untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar dapat memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda (Rahmawati, 2020). Oleh karena itu, para guru di sekolah ini perlu menyesuaikan proses belajar mengajar, termasuk memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang membutuhkan.

Fasilitas dan sumber daya di SMA Negeri X Bekasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan zonasi, meskipun keterbatasan ruang kelas dan fasilitas pendukung menghambat pengalaman belajar yang optimal. Untuk mengatasi masalah ini, telah dilakukan solusi berupa pemanfaatan teknologi dan kerja sama dengan pihak ketiga (Setiadi, 2019). Meskipun kebijakan zonasi memberi peluang pemerataan akses pendidikan, tantangan dalam peningkatan kualitas, seperti kompetensi pengajar dan sarana, tetap ada. Dukungan dari masyarakat dan orang tua sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif (Rahmawati, 2020).

Pemerintah perlu terus memantau dampak kebijakan ini, khususnya terkait pemerataan anggaran untuk meningkatkan fasilitas di sekolah-sekolah non-unggulan (Kemendikbud, 2019). Keberhasilan kebijakan zonasi sangat bergantung pada kemampuan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang sebelumnya mungkin tidak dianggap unggul. Di SMA Negeri X Bekasi, tantangan ini diatasi dengan penyesuaian kurikulum dan pengembangan kapasitas guru. Kebijakan zonasi yang tercantum dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018 dan perubahannya juga mencakup jalur afirmasi untuk siswa kurang mampu dan jalur prestasi untuk siswa berprestasi, dengan pemerintah daerah berperan dalam penyesuaian alokasi kuota lokal. Berdasarkan kebijakan PPDB berbasis zonasi yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, Kemendikbud Ristek terus berusaha untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di semua sekolah, termasuk SMA Negeri X Bekasi.

Data terbaru mengenai kebijakan zonasi di SMA Negeri X Bekasi menunjukkan bahwa penerapan sistem zonasi telah membawa perubahan dalam komposisi siswa dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Kebijakan zonasi telah memperluas akses bagi siswa dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial, sehingga mengurangi kesenjangan antar sekolah. Meskipun kualitas guru dan fasilitas pendidikan di SMA Negeri X Bekasi belum sepenuhnya merata, perbaikan terus berlangsung. Selain itu, sistem ini juga memberikan kenyamanan bagi

siswa karena mereka dapat bersekolah lebih dekat dengan rumah, yang mendukung fokus pada kegiatan akademik dan non-akademik yang mendukung perkembangan sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi kebijakan zonasi terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri X Bekasi. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan kebijakan zonasi mempengaruhi kondisi akademik dan pembelajaran di sekolah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang berkontribusi pada efektivitas kebijakan zonasi dalam mencapai tujuan pemerataan pendidikan, dengan melihat sejauh mana kebijakan ini dapat mengurangi kesenjangan antar siswa dan meningkatkan akses pendidikan bagi berbagai lapisan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi dampak kebijakan zonasi terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri X Bekasi. Pemilihan subjek penelitian difokuskan pada sekolah tersebut, dengan sampel yang mencakup siswa dari berbagai latar belakang, serta melibatkan guru, orang tua, kepala sekolah, dan staf administrasi. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena yang kompleks terkait kebijakan zonasi, seperti perubahan komposisi siswa, akses terhadap sumber daya pendidikan, dan pandangan berbagai pihak terkait (Stake, 1995). Penelitian ini berlangsung di SMA Negeri X Bekasi dengan waktu pelaksanaan dari 14 Oktober hingga 31 Oktober 2024, melalui beberapa fase yang telah dijadwalkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan siswa, guru, orang tua siswa, dan kepala sekolah untuk memperoleh informasi terkait pengalaman dan pandangan mereka terhadap kebijakan zonasi. Observasi partisipatif dilakukan di kelas untuk mengamati proses pembelajaran dan interaksi antara siswa dan guru, serta kondisi fisik sekolah. Dokumen terkait kebijakan zonasi, seperti laporan kegiatan dan dokumen sekolah, juga dikumpulkan sebagai data pendukung. Instrumen penelitian yang digunakan mencakup pedoman wawancara yang disesuaikan dengan subjek penelitian, serta lembar observasi untuk mencatat aktivitas siswa dan interaksi di kelas.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan ditranskrip dan disusun sistematis. Proses reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan dan mengkategorikan informasi agar mudah dianalisis. Penyajian data akan dilakukan dalam bentuk naratif, tabel, atau diagram. Untuk memastikan keabsahan temuan, peneliti akan melakukan verifikasi data melalui triangulasi, yaitu membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen. Selain itu, kajian literatur juga dilakukan untuk menganalisis penelitian sebelumnya dan kebijakan pendidikan terkait dampak kebijakan zonasi terhadap kualitas pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Kebijakan Zonasi Terhadap Kualitas Pendidikan Akses Dan Distribusi Sumber Daya Pendidikan

Penerapan kebijakan zonasi di SMA Negeri X Bekasi telah berdampak signifikan pada akses dan distribusi sumber daya pendidikan. Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah guru dari 67 menjadi 72 orang, yang bertujuan untuk menangani penambahan siswa dari berbagai wilayah. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah ruang kelas dari 30 menjadi 31 untuk mengakomodasi siswa baru, serta penambahan laboratorium fisika guna mendukung pembelajaran yang lebih beragam. Fasilitas olahraga juga mengalami peningkatan, dengan penambahan lapangan sepak bola, sementara jumlah komputer bertambah dari 80 menjadi 80 unit komputer ditambah 10 tablet, mencerminkan peningkatan akses teknologi. Hal ini

menunjukkan bahwa kebijakan zonasi mendorong perbaikan fasilitas sekolah untuk mendukung inklusi siswa yang lebih heterogen.

Tabel 1. Perbandingan Sumber Daya Pendidikan di SMA Negeri X Bekasi Sebelum dan Setelah Penerapan Kebijakan Zonasi

Sumber Daya Pendidikan	Sebelum Kebijakan Zonasi	Setelah Kebijakan Zonasi	Keterangan
Jumlah Guru	67	72	Penambahan guru untuk menangani peningkatan jumlah siswa.
Rasio Siswa per Guru	36 : 1	36 : 1	Rasio siswa per guru meningkat karena jumlah siswa yang lebih beragam.
Ruang Kelas	30	31	Penambahan ruang kelas untuk mengakomodasi siswa baru.
Laboratorium	4	4	Adanya Penambahan fasilitas pada laboratorium fisika dan biologi untuk mendukung pembelajaran.
Perpustakaan	1	1	Perpustakaan tetap, tetapi dengan peningkatan koleksi buku.
Materi Ajar	4 jenis buku pelajaran	5 jenis buku pelajaran	Penambahan materi ajar baru sesuai kurikulum yang lebih inklusif.
Fasilitas Olahraga	2 lapangan olahraga	2 lapangan olahraga	Untuk lapangan tetap, tetapi ada Penambahan fasilitas-fasilitas olahraga untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler.
Fasilitas Teknologi	80 komputer	80 komputer + 10 Tablet	Peningkatan jumlah komputer untuk mendukung pembelajaran digital.



Gambar 1. Distribusi Sumber Daya Pendidikan Setelah Kebijakan Zonasi

Perubahan Dalam Komposisi Siswa Akses Dan Distribusi Sumber Daya Pendidikan

Zonasi mempengaruhi komposisi siswa di SMA Negeri X Bekasi dengan menghadirkan keberagaman latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Ini terlihat dari konsistennya rasio siswa per guru, dari 36:1 dan tetap bertahan di 36:1, yang mencerminkan dengan bertambahnya jumlah kelas dan kapasitas siswa dari berbagai wilayah didukung dengan penambahan jumlah guru yang sama. Dengan adanya siswa dari latar belakang yang lebih beragam, proses

pembelajaran pun menjadi lebih dinamis. Walaupun ada beberapa tantangan, seperti adaptasi guru terhadap kebutuhan yang lebih bervariasi, kebijakan zonasi pada dasarnya bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan. Responden dalam wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian besar merasa komposisi siswa yang lebih heterogen tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga memperkaya interaksi di dalam kelas.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kebijakan zonasi di SMA Negeri X Bekasi mendapatkan beragam respon dari para responden. Berdasarkan wawancara semi-struktural, mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap kebijakan ini, dengan tujuh responden (35%) menilai kebijakan zonasi "Baik" dan tiga responden (15%) menilai "Sangat Baik". Namun, ada juga yang merasa kebijakan ini cukup, dengan lima responden (25%) memberikan penilaian tersebut. Mengenai apakah kebijakan zonasi memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa, hasilnya cukup bervariasi. Sebagian besar responden cenderung setuju atau sangat setuju, namun masih ada responden yang merasa kebijakan ini tidak sepenuhnya adil. Pada pertanyaan mengenai kualitas pendidikan setelah kebijakan zonasi diterapkan, mayoritas responden (30%) menilai kualitas pendidikan "Baik", meskipun ada juga yang merasa kualitasnya masih "Cukup" atau bahkan "Buruk". Dalam hal dukungan dari guru, mayoritas responden (40%) merasa dukungan yang diberikan cukup, namun masih ada yang merasa kurang, yang mencerminkan adanya kesenjangan dalam penyediaan dukungan bagi siswa dari latar belakang yang berbeda. Selain itu, mengenai pengaruh komposisi siswa terhadap proses belajar mengajar, sebagian besar responden (55%) setuju bahwa keberagaman komposisi siswa berpengaruh pada dinamika kelas dan pengajaran.

Sementara itu, mengenai rata-rata nilai ujian siswa menunjukkan adanya peningkatan setelah kebijakan zonasi diterapkan. Rata-rata nilai ujian untuk Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS mengalami kenaikan yang signifikan, meskipun perubahan tersebut tidak terlalu besar. Rata-rata nilai Matematika meningkat dari 90 menjadi 93, Bahasa Indonesia dari 96 menjadi 98, IPA dari 94 menjadi 95, dan IPS dari 91 menjadi 94. Peningkatan ini menunjukkan adanya dampak positif dari kebijakan zonasi terhadap kualitas akademik siswa, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memaksimalkan dampak positifnya. Secara keseluruhan, kebijakan zonasi tampaknya memberikan peluang lebih merata bagi siswa, tetapi terdapat tantangan dalam memastikan kualitas pendidikan dan dukungan yang memadai untuk semua siswa.

Dampak pada prestasi akademik dan non-akademik Akses dan distribusi sumber daya pendidikan

Kebijakan zonasi tampaknya membawa dampak positif pada prestasi akademik siswa. Hal ini terlihat dari peningkatan rata-rata nilai ujian di beberapa mata pelajaran. Sebelum kebijakan zonasi, rata-rata nilai ujian matematika adalah 90, yang kemudian meningkat menjadi 93 setelah zonasi. Kenaikan serupa juga terjadi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Di luar prestasi akademik, penambahan fasilitas olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler seperti lapangan sepak bola menunjukkan adanya peningkatan pada aspek non-akademik, yang berfungsi menyeimbangkan antara kemampuan akademik dan minat siswa di bidang olahraga dan seni. Kebijakan ini memungkinkan siswa untuk berkembang lebih menyeluruh di berbagai bidang keterampilan, tidak hanya terbatas pada prestasi akademik.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Sari dan Mulyadi (2020) dan Nugraha dan Pratama (2021) mengenai Evaluasi Kebijakan Zonasi di Sekolah Menengah di Indonesia dan Implementasi Kebijakan Zonasi Pendidikan dan Kualitas Pembelajaran, yang menyatakan bahwa Kebijakan zonasi meningkatkan akses siswa di sekolah menengah, namun ada tantangan terkait kesiapan fasilitas dan tenaga pengajar. menemukan bahwa kebijakan zonasi dapat meningkatkan akses siswa. Selain itu, kedua penelitian ini menekankan masalah kesiapan

fasilitas dan tenaga pengajar untuk menangani keberagaman siswa yang disebabkan oleh kebijakan zonasi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implikasi Persepsi Stakeholder (Guru, Siswa, Orang Tua)

Persepsi dari para guru, siswa, dan orang tua sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan zonasi diimplementasikan dan diterima di SMA Negeri X Bekasi. Dari hasil wawancara, sebagian besar guru dan siswa memiliki pandangan yang cukup positif terhadap kebijakan ini. Mayoritas responden menilai kebijakan zonasi sebagai langkah yang baik untuk memperluas akses pendidikan, meskipun ada juga yang merasa komposisi siswa yang lebih beragam dapat menambah tantangan dalam proses pembelajaran. Orang tua, di sisi lain, mungkin memiliki pandangan yang lebih beragam tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kesempatan anak mereka masuk ke sekolah yang diinginkan. Sebagian mungkin melihatnya sebagai upaya untuk pemerataan, sementara yang lain merasa khawatir tentang potensi penurunan kualitas karena heterogenitas siswa yang meningkat.

Analisis terhadap rincian kebijakan pendidikan daerah yang memengaruhi implementasi kebijakan zonasi menunjukkan bahwa berbagai kebijakan daerah memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas zonasi di sekolah. Salah satu kebijakan utama adalah pengalokasian anggaran pendidikan, yang berfokus pada peningkatan alokasi dana untuk sekolah-sekolah di daerah yang terdampak zonasi. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki fasilitas, menambah jumlah guru, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan adanya alokasi dana yang lebih besar, sekolah-sekolah di daerah tersebut dapat mengakomodasi jumlah siswa yang meningkat akibat penerapan kebijakan zonasi.

Pemerataan fasilitas pendidikan juga menjadi kebijakan penting yang mendukung kebijakan zonasi. Pemerintah daerah mendorong pembangunan infrastruktur seperti kelas, laboratorium, dan perpustakaan di sekolah-sekolah untuk mengakomodasi jumlah siswa yang semakin banyak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga meskipun jumlah siswa yang diterima di sekolah-sekolah daerah meningkat.

Rekrutmen dan distribusi guru juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan zonasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menempatkan guru-guru di sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar karena adanya peningkatan jumlah siswa akibat kebijakan zonasi. Selain itu, kebijakan ini juga mengedepankan peningkatan kualitas guru agar mampu mengajar siswa dari berbagai latar belakang dengan lebih efektif.

Kurikulum lokal dan pengembangan bahan ajar menjadi hal penting untuk disesuaikan dengan keberagaman siswa yang semakin banyak setelah penerapan kebijakan zonasi. Kurikulum yang lebih fleksibel dan bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang sosial dan budaya sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan siswa yang lebih beragam.

Peningkatan kualitas pendidikan berbasis teknologi juga sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan zonasi. Dengan meningkatnya akses teknologi di sekolah-sekolah daerah, seperti penambahan jumlah komputer, tablet, dan peningkatan kualitas internet, proses pembelajaran dapat dilakukan secara digital, yang semakin relevan di era modern. Selain itu, pemasangan sistem fingerprint juga dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dalam hadir di sekolah.

Program pendidikan inklusif adalah kebijakan yang mendukung penerimaan siswa dari berbagai tingkat sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini sesuai dengan prinsip kebijakan zonasi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antar siswa. Program ini memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakangnya, mendapatkan pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi.

Fasilitas penunjang kegiatan ekstrakurikuler, seperti fasilitas olahraga dan seni, juga menjadi fokus penting dalam kebijakan pendidikan daerah. Pemerintah daerah berupaya membangun dan memperbaiki fasilitas ini untuk menyeimbangkan pendidikan akademik dengan minat siswa dari berbagai daerah. Dengan adanya fasilitas yang memadai, siswa dapat mengembangkan potensi mereka di luar kegiatan akademik. Terakhir, program pelatihan guru dan tenaga pendidikan sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam menangani kelas yang lebih heterogen akibat kebijakan zonasi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kelas yang terdiri dari siswa dengan latar belakang yang sangat beragam, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal.

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan daerah yang mendukung implementasi kebijakan zonasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pendidikan, pemerataan akses pendidikan, serta penanganan keberagaman siswa di sekolah. Implementasi yang baik dari kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat memaksimalkan dampak positif kebijakan zonasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Analisis terhadap tabel penelitian terdahulu menunjukkan berbagai temuan yang relevan dengan kebijakan zonasi pendidikan dan implementasinya di Indonesia. Penelitian pertama, *"Evaluasi Kebijakan Zonasi di Sekolah Menengah di Indonesia"* oleh Sari dan Mulyadi (2020), menemukan bahwa kebijakan zonasi meningkatkan akses siswa ke sekolah menengah. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kesiapan fasilitas dan tenaga pengajar yang belum sepenuhnya memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan zonasi dapat meningkatkan pemerataan akses, kesenjangan dalam kualitas fasilitas dan tenaga pengajar perlu diperhatikan.

Penelitian kedua, *"Implementasi Kebijakan Zonasi Pendidikan dan Kualitas Pembelajaran"* oleh Nugraha dan Pratama (2021), menyatakan bahwa kebijakan zonasi berhasil meningkatkan keberagaman siswa dan mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit. Namun, tantangan yang sama juga ditemukan, yaitu infrastruktur yang masih belum memadai untuk mendukung keberagaman siswa yang lebih besar di dalam kelas. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perbaikan infrastruktur sebagai kunci untuk mengoptimalkan keberhasilan kebijakan zonasi.

Dalam penelitian ketiga, *"Pengaruh Zonasi Pendidikan Terhadap Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan"* oleh Wijaya dan Rahmat (2019), ditemukan bahwa kebijakan zonasi berhasil mengurangi ketimpangan pendidikan di daerah perkotaan, tetapi pelatihan guru yang lebih intensif diperlukan untuk menghadapi kelas yang lebih heterogen. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan zonasi dalam pemerataan akses pendidikan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengajaran, yang salah satunya bisa dicapai melalui pelatihan guru yang berkelanjutan.

Penelitian keempat, *"Pendidikan Inklusif dan Kebijakan Pendidikan"* oleh Hasan (2022), menekankan pentingnya kebijakan pendidikan inklusif yang selaras dengan kebijakan zonasi dalam memperluas akses pendidikan yang merata. Penelitian ini relevan dalam mendukung keberagaman siswa yang terdaftar melalui kebijakan zonasi, dengan menekankan bahwa pendidikan harus mampu mengakomodasi perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang setara. Penelitian terakhir, *"Manajemen Pendidikan dan Kebijakan Zonasi"* oleh Anwar (2023), memberikan wawasan praktis mengenai manajemen dan implementasi kebijakan zonasi di sekolah. Penelitian ini mengarahkan perhatian pada aspek praktis dan teknis dalam penerapan kebijakan zonasi, yang sangat relevan bagi penelitian tentang kebijakan zonasi di SMA, termasuk tantangan dan solusi terkait pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu memberikan gambaran yang jelas tentang manfaat dan tantangan kebijakan zonasi pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini berhasil meningkatkan pemerataan akses pendidikan, namun tantangan terkait infrastruktur,

kualitas pengajaran, dan pelatihan guru perlu terus diatasi agar kebijakan zonasi dapat sepenuhnya mengoptimalkan kualitas pendidikan di seluruh daerah.

Tabel 2. Uji Inter Rater Reliability

Sumber Daya Pendidikan	Sebelum Kebijakan Zonasi	Setelah Kebijakan Zonasi	Kesepakatan
Jumlah Guru	67	72	Setuju
Rasio Siswa per Guru	36 : 1	36 : 1	Setuju
Ruang Kelas	30	31	Setuju
Laboratorium	4	4	Setuju
Perpustakaan	1	1	Setuju
Materi Ajar	4	5	Setuju
Fasilitas Olahraga	2 lapangan olahraga	2 lapangan olahraga	Setuju
Fasilitas Teknologi	80 komputer	80 komputer + 10 Tablet	Setuju

Infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendidikan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan zonasi. Di SMA Negeri X Bekasi, peningkatan jumlah ruang kelas, laboratorium, fasilitas olahraga, dan komputer mencerminkan langkah-langkah yang diambil untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan zonasi. Namun, meskipun fasilitas telah ditingkatkan, peningkatan rasio siswa per guru masih sama yaitu pada perbandingan dari 36:1 dan bertahan pada angka 36:1 menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam menjaga kualitas pengajaran ketika jumlah siswa bertambah. Kondisi infrastruktur yang memadai sangat berperan dalam mendukung proses belajar mengajar, terutama dalam menghadapi lonjakan jumlah siswa yang lebih heterogen.

Kebijakan Pendidikan Daerah

Kebijakan pendidikan daerah memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi zonasi. Salah satu kebijakan yang signifikan adalah peningkatan anggaran untuk pendidikan, yang digunakan untuk memperbaiki fasilitas, menambah jumlah guru, dan memperkuat kualitas pengajaran. Pemerataan fasilitas di berbagai sekolah juga merupakan bagian penting dari kebijakan ini, dengan tujuan memastikan bahwa sekolah-sekolah yang menerima siswa zonasi memiliki infrastruktur yang layak. Selain itu, rekrutmen guru dan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menghadapi siswa dengan latar belakang yang lebih beragam sangat berpengaruh pada keberhasilan kebijakan zonasi.

Zonasi berhasil mengurangi ketimpangan pendidikan di daerah perkotaan, namun pelatihan guru perlu ditingkatkan untuk menghadapi keberagaman siswa, seperti hasil penelitian dari Wijaya dan Rahmat (2019), yang menyatakan dalam penelitian Pengaruh Zonasi Pendidikan Terhadap Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan, menunjukkan bahwa zonasi berhasil mengurangi ketimpangan pendidikan di daerah perkotaan sambil menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas guru.

KESIMPULAN

Penerapan kebijakan zonasi di SMA Negeri X Bekasi telah membawa dampak positif terhadap peningkatan sumber daya pendidikan, termasuk jumlah guru, ruang kelas, dan fasilitas teknologi. Meskipun rasio siswa per guru tetap sama meskipun jumlah siswa meningkat, keberagaman komposisi siswa menambah dinamika dalam pengelolaan kelas. Namun, hal ini tidak menghambat prestasi akademik, bahkan terdapat peningkatan yang signifikan, terutama dalam mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Kebijakan zonasi ini juga mendukung pemerataan akses pendidikan di sekolah, meskipun masih diperlukan penguatan

infrastruktur dan pelatihan bagi guru guna meningkatkan kualitas pengajaran yang lebih baik untuk mencapai hasil yang optimal.

REFERENSI

- Aditomo, A., & Faridz, N. F. (2019). Ketimpangan mutu dan akses pendidikan di Indonesia: Potret berdasarkan survei PISA 2015. <https://doi.org/10.31227/osf.io/k76g3>
- Ahmad, I. F. (2021). Evaluasi implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru tahun 2021 dengan sistem real-time di Kota Yogyakarta. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian*, 7(3), 129–135. <https://doi.org/10.26740/jrpd.v7n3.p129-135>
- Al Barwani, T., & Osman, M. E. (2010). Academic development and quality in Oman: Mapping the terrain. In C. S. Nair, L. Webster, & P. B. Mertova (Eds.), *Chandos Learning and Teaching Series* (pp. 147–166). Chandos Publishing. <https://doi.org/10.1016/B978-1-84334-576-3.50010-8>
- Anggraeni, A., Helpiastuti, S. B., & Wahono, P. (2022). Implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 5234–5241.
- BBC Indonesia. (2019). PPDB sistem zonasi: Banyak problem di lapangan, Kemendikbud bentuk satgas. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48782787>
- Cahyani, A., & Nawangsari, E. (2020). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(3), 1–6. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i3.23>
- CNBC Indonesia. (2020). Masalah pendidikan RI: SMP rawan DO, SMK tidak sesuai pasar. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200916001442-4-187107/masalah-pendidikan-ri-smp-rawan-do-smk-tidak-sesuai-pasar>
- Dewi, K. P. (2021). Dampak kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Magelang bagi sekolah dan peserta didik. *JMAN Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 5(2), 1–8.
- Dewi, R. C., Subowo, A., & Afrizal, T. (2022). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 49–65.
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Fajar Sidik. (2022). Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap kualitas sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama.
- Hajaroh, M. (2021). High order thinking skill sebagai landasan dalam pengembangan asesmen dan evaluasi pendidikan. *Foundasia*, 12(2).
- Hajaroh, M., Nurhayati, R., Sidiq, F., Raharjo, A. S., & Sholikhah, E. (2021). School zoning policy and equalization of education access for poor students in Yogyakarta City. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v6i2.9992>
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Handani, M. S., & Frinaldi, A. (2020). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi pada SMP Negeri di Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 2(3), 73–86.
- Hermanto, B. (2020). Perekayasaan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. *Foundasia*, 11(2).
- Junaedy, I. K. (2022). Efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah menengah pertama (SMP) Negeri di Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 114–118. <https://doi.org/10.22225/pi.7.2.2022.114-118>

- Junaedy, I. K., Mardika, I. M., & Yudhiantara, I. M. (2021). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6*(2), 107–115.
- Kemdikbud. (2017). *Mendikbud: Target kita bukan sekadar pemerataan akses, tetapi akses yang berkualitas*.
- Kemendikbud. (2018). Semua bisa sekolah! Zonasi untuk pemerataan yang berkualitas. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas>
- Kominfo. (2020). Semua bisa sekolah! Zonasi untuk pemerataan yang berkualitas. https://kominfo.go.id/content/detail/13689/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas/0/artikel_gpr
- Kristyaningrum, D. H., Ardiansyah, A., & Fadilah, K. (2019). Evaluasi program penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di Kabupaten Brebes menggunakan model CIPP. *DIALEKTIKA Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 9(2), 186–195.
- Lee, J., & Barro, R. (2001). Schooling quality in a cross-section of countries. *Economica*, 68(272), 465–488. <https://doi.org/10.1111/1468-0335.d01-12>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Sage Publications.